

Sejarah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Pengaruh Politikanya pada Pemilu Presiden 2019

Audrey G.D Tangkudung*, Fajar Kurniawan

Universitas Indonesia

Email: audreygdt2018@gmail.com*, fkurniawan74@gmail.com

Keywords:

gerindra party, 2019 presidential election, charismatic leadership, electoral coalition, indonesian politics

Abstract

The emergence of new political parties in post-reform Indonesia has significantly changed the dynamics of democratic competition, with the Greater Indonesia Movement Party (Gerindra) standing out as an important actor despite being a relatively newly established party in 2008. This article examines in depth the birth process and growth dynamics of the Great Indonesia Movement Party (Gerindra) as well as tracing the contribution and impact of its political power in the contestation of the 2019 Indonesian Presidential Election. This study applies a qualitative perspective in the realm of history and politics with data collection techniques through literature review, review of official archives of organizations, election regulations, national press reports, and various relevant academic publications. The theoretical frameworks used include institutional theory of political parties, theory of charismatic leadership, and theory of electoral coalition. The results of the study show that Gerindra as a relatively new political party has been able to develop rapidly through strengthening its organizational structure, centrality of leadership figures, and adaptive electoral coalition strategies. In the context of the 2019 presidential election, Gerindra played a significant role in forming political opposition and influencing the dynamics of democratic competition in Indonesia. These findings enrich the study of the role of opposition parties and charismatic leadership in Indonesia's electoral democracy.

Kata Kunci:

partai gerindra, pemilu presiden 2019, kepemimpinan karismatik, koalisi elektoral, politik indonesia

Abstrak

Kemunculan partai-partai politik baru di Indonesia pascareformasi telah secara signifikan mengubah dinamika kompetisi demokrasi, di mana Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menonjol sebagai aktor penting meskipun tergolong partai yang relatif baru didirikan pada tahun 2008. Artikel ini menelaah secara mendalam proses lahirnya serta dinamika pertumbuhan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekaligus menelusuri kontribusi dan dampak kekuatan politikanya pada kontestasi Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2019. Kajian ini menerapkan perspektif kualitatif dalam ranah sejarah dan politik dengan teknik pengumpulan data melalui telaah literatur, pengkajian arsip resmi organisasi, regulasi pemilihan umum, laporan pers nasional, dan berbagai publikasi akademik yang relevan. Kerangka teoretis yang digunakan meliputi teori institusional partai politik, teori kepemimpinan karismatik, dan teori koalisi elektoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa Gerindra sebagai partai politik relatif baru mampu berkembang pesat melalui penguatan struktur organisasi, sentralitas figur kepemimpinan, dan strategi koalisi elektoral yang adaptif. Dalam konteks Pilpres 2019, Gerindra memainkan peran signifikan dalam membentuk oposisi politik dan memengaruhi dinamika kompetisi demokratis di Indonesia. Temuan ini memperkaya kajian tentang peran partai oposisi dan kepemimpinan karismatik dalam demokrasi elektoral Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia pascareformasi ditandai oleh munculnya berbagai partai politik baru yang berkompetisi dalam pemilihan umum legislatif dan presiden (Aspinall, 2014) dan (Ufen, 2008). Dinamika tersebut mencerminkan terbukanya ruang politik bagi aktor-aktor baru untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi sekaligus memperkaya kontestasi ideologis dan programatik. Di antara berbagai organisasi politik yang tampil dominan dalam konfigurasi perpolitikan nasional terdapat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sejak pembentukannya pada tahun 2008, Gerindra mampu berkembang pesat dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang hingga menjelma sebagai aktor politik sentral di Indonesia dalam pemilu legislatif serta pemilu presiden.

Kemunculan Gerindra tidak dapat dilepaskan dari konteks ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kinerja partai-partai lama serta keresahan atas isu kedaulatan ekonomi, ketimpangan sosial, dan lemahnya posisi negara dalam menghadapi kekuatan pasar global (Mietzner, 2013; Robison & Hadiz, 2014). Narasi nasionalisme dan kemandirian ekonomi yang diusung Gerindra menemukan resonansi di kalangan pemilih tertentu, terutama mereka yang menginginkan perubahan arah kebijakan nasional. Dalam konteks ini, Gerindra bukan sekadar fenomena elektoral, tetapi juga representasi dari artikulasi kepentingan politik tertentu dalam masyarakat Indonesia.

Beberapa penelitian telah mengkaji fenomena partai politik baru di Indonesia pascareformasi. Mietzner, (2013) dalam studinya tentang partai politik pasca-otoriter Indonesia menemukan bahwa uang, kekuasaan, dan ideologi menjadi faktor determinan dalam keberhasilan partai baru. Penelitiannya menunjukkan bahwa partai seperti Gerindra mampu bertahan karena kombinasi antara kepemimpinan kuat dan mobilisasi sumber daya yang efektif. (Aspinall & Sukmajati, 2016) menyoroti dinamika politik uang dan patronase di tingkat akar rumput, yang justru memperkuat posisi partai-partai besar termasuk Gerindra dalam kompetisi elektoral.

Sementara itu, Warburton & Aspinall, (2019) menganalisis kemunduran demokrasi Indonesia dan menemukan bahwa polarisasi politik yang melibatkan Gerindra sebagai oposisi utama berkontribusi pada meningkatnya ketegangan ideologis di masyarakat. Penelitian (Slater & Simmons, 2018) tentang ketidakpastian politik dan ketahanan otoriter menunjukkan bahwa partai oposisi seperti Gerindra sering kali harus berkompromi dengan kekuasaan yang ada demi stabilitas koalisi. (Mietzner, 2020) kemudian menambahkan bahwa inovasi otoriter dan penyempitan ruang elektoral justru dimanfaatkan oleh partai seperti Gerindra untuk memperkuat basis dukungan populisnya.

Namun, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik membahas sejarah pembentukan Gerindra secara mendalam serta pengaruh politiknya dalam konteks Pemilu Presiden 2019 secara komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis institusionalisasi partai, kepemimpinan karismatik, dan strategi koalisi elektoral dalam satu kerangka kajian yang terintegrasi, serta fokus spesifik pada peran Gerindra dalam Pilpres 2019 yang belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana sejarah pembentukan dan perkembangan Partai Gerindra sejak berdiri hingga menjelang Pemilu Presiden 2019. Kedua, bagaimana strategi politik Gerindra dalam menghadapi Pilpres 2019, termasuk pembentukan koalisi dan

mobilisasi dukungan pemilih. Ketiga, seberapa besar pengaruh Gerindra terhadap dinamika politik nasional, khususnya dalam konteks penguatan oposisi dan kompetisi politik.

Kajian ini penting secara akademik karena memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana partai politik baru dapat bertransformasi menjadi aktor sentral dalam sistem politik demokratis (Panebianco, 1988; Mainwaring & Scully, 1995). Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada diskursus tentang peran kepemimpinan karismatik dan strategi koalisi dalam pemilu presiden di negara demokrasi berkembang. Dari sisi implementatif, hasil riset ini diharapkan mampu berfungsi sebagai rujukan konseptual dan operasional dalam proses pembenahan struktur organisasi partai politik serta peningkatan mutu praktik demokrasi di Indonesia secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan paparan konteks dan argumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya, pokok persoalan yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut: (1) Bagaimana sejarah pembentukan dan perkembangan Partai Gerakan Indonesia Raya? (2) Apa strategi politik yang diterapkan Partai Gerindra dalam Pemilu Presiden 2019? (3) Seberapa besar pengaruh Partai Gerindra terhadap dinamika politik nasional Indonesia?

Konsisten dengan pertanyaan penelitian yang telah dirancang sebelumnya, sasaran utama penelitian ini diarahkan untuk: (1) Menganalisis sejarah dan proses institusionalisasi Partai Gerindra; (2) Mengkaji strategi politik dan koalisi elektoral Gerindra dalam Pilpres 2019; dan (3) Menilai pengaruh politik Gerindra terhadap dinamika demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis sejarah dan proses institusionalisasi Partai Gerindra sejak pendiriannya hingga menjelang Pemilu Presiden 2019. Kedua, untuk mengkaji strategi politik dan koalisi elektoral yang diterapkan Gerindra dalam menghadapi Pilpres 2019, termasuk pembentukan koalisi dan mobilisasi dukungan pemilih. Ketiga, untuk menilai seberapa besar pengaruh Partai Gerindra terhadap dinamika politik nasional Indonesia, khususnya dalam konteks penguatan oposisi dan kompetisi politik.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian partai politik di negara demokrasi berkembang, khususnya dalam memperkaya literatur tentang institusionalisasi partai baru, kepemimpinan karismatik, dan strategi koalisi elektoral, sekaligus mengisi kesenjangan akademik mengenai peran spesifik Gerindra dalam Pilpres 2019. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan elit partai dalam merancang penguatan kelembagaan partai, bagi praktisi politik sebagai wawasan membangun basis dukungan dan koalisi strategis, bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi elektoral yang lebih kritis, serta bagi akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai rujukan awal untuk mengeksplorasi aspek lain dari partai politik di Indonesia.

Teori institusional partai politik menekankan pentingnya struktur organisasi, aturan internal, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam menentukan keberlanjutan dan efektivitas partai (Panebianco, 1988; Randall & Svåsand, 2002). Partai yang terinstitusionalisasi dengan baik cenderung memiliki stabilitas organisasi, loyalitas kader, dan kemampuan adaptasi yang lebih tinggi terhadap perubahan lingkungan politik. Dalam konteks Gerindra, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana partai membangun struktur kepengurusan, sistem kaderisasi, dan jaringan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.

Teori kepemimpinan karismatik menjelaskan bagaimana figur pemimpin dengan daya tarik personal, visi ideologis, dan kemampuan retorika mampu memobilisasi dukungan politik (Weber, 1978; House, 1997). Dalam banyak kasus, partai politik baru sangat bergantung pada figur sentral sebagai simbol perjuangan dan identitas kolektif. Teori ini relevan untuk memahami peran kepemimpinan dalam membangun citra dan basis dukungan Gerindra, terutama dalam kontestasi Pilpres 2019.

Teori koalisi elektoral menjelaskan bahwa dalam sistem multipartai, partai politik cenderung membentuk koalisi untuk memaksimalkan peluang kemenangan dalam pemilu presiden (Laver & Schofield, 1998; Strøm, Müller, & Bergman, 2008). Pembentukan koalisi tidak hanya didasarkan pada kesamaan ideologis, tetapi juga pada kalkulasi strategis terkait distribusi kekuasaan dan dukungan elektoral. Teori ini digunakan untuk menganalisis strategi koalisi Gerindra dan dampaknya terhadap peta politik nasional.

Literatur tentang partai politik menunjukkan bahwa keberhasilan partai baru sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu figur kepemimpinan, kekuatan organisasi kader, dan kemampuan membangun narasi politik yang resonan dengan aspirasi pemilih (Harmel & Svåsand, 1993; Kitschelt, 2000). Studi-studi tentang demokrasi Indonesia juga menegaskan bahwa keberadaan partai oposisi yang kuat merupakan elemen penting dalam menjaga kompetisi politik, akuntabilitas pemerintah, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif berbasis historis politik guna menginvestigasi perjalanan historis, pola strategi, serta dampak kekuatan politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Pemilu Presiden 2019 secara komprehensif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami proses, makna, dan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi tindakan aktor serta dinamika institusional partai politik (Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2018).

Desain Penelitian

Desain penelitian yang diterapkan berupa kajian historis yang memberikan fokus mendalam pada telaah dinamika politik kontemporer sebagai kerangka interpretasi utama. Studi historis bertujuan merekonstruksi proses pembentukan dan perkembangan Gerindra sejak pendiriannya hingga perannya dalam Pilpres 2019, dengan menempatkan peristiwa politik dalam konteks waktu dan struktur kekuasaan yang lebih luas (Gottschalk, 1969; Tosh, 2015). Desain ini relevan untuk menjelaskan transformasi partai baru menjadi aktor politik utama dalam sistem multipartai Indonesia.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Informasi penelitian dihimpun melalui penelusuran literatur dan pengarsipan dokumen. Data utama mencakup arsip formal partai berupa Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga AD atau ART, pernyataan visi politik, orasi tokoh elit partai, serta dokumen Komisi Pemilihan Umum yang berkaitan dengan Pemilu Presiden 2019. Sumber data sekunder mencakup buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga riset, serta pemberitaan media arus utama yang relevan dengan topik penelitian. Studi dokumentasi dipilih karena efektif untuk menelusuri kebijakan, narasi politik, dan praktik kelembagaan partai secara sistematis (Bowen, 2009; Flick, 2018).

Teknik Analisis Data

Pengolahan data ditempuh melalui tiga fase pokok yang sistematis. Tahap awal berupa penyederhanaan data dengan cara memilah serta mengelompokkan dokumen sesuai fokus kajian yaitu institusionalisasi partai, kepemimpinan karismatik, dan koalisi elektoral agar struktur analisis menjadi terarah. Kedua, penyajian data dalam bentuk uraian naratif-analitis untuk mengidentifikasi pola, hubungan kausal, dan dinamika politik yang muncul. Ketiga, penarikan kesimpulan melalui interpretasi kritis terhadap temuan dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis yang digunakan. Proses analisis ini mengikuti prinsip analisis kualitatif tematik yang menekankan konsistensi, kedalaman interpretasi, dan keterkaitan antara data dan teori (Braun & Clarke, 2006; Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Validitas dan Keabsahan Data

Dalam rangka memastikan validitas temuan, studi ini mengimplementasikan teknik triangulasi sumber melalui proses komparasi informasi yang berasal dari beragam dokumen serta referensi akademik yang berbeda karakter. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan silang antara narasi resmi partai dan analisis kritis dari akademisi serta pengamat politik. Langkah ini bertujuan meminimalkan bias interpretasi dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Lincoln & Guba, 1985; Creswell & Miller, 2000).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketergantungan terhadap data sekunder dan dokumen tertulis, sehingga tidak sepenuhnya menangkap dinamika internal partai yang bersifat informal. Namun demikian, penggunaan sumber akademik yang luas dan analisis teoretis yang mendalam diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan valid mengenai peran politik Gerindra dalam Pemilu Presiden 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Partai Gerakan Indonesia Raya

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) resmi berdiri pada 6 Februari 2008 di tengah konfigurasi politik era pascareformasi yang memperlihatkan terpecahnya sistem kepartaian serta merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai yang telah lama eksis. Pembentukan Gerindra tidak dapat dilepaskan dari peran sentral figur Prabowo Subianto yang sebelumnya aktif dalam Partai Golkar dan sempat mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2004 sebagai calon wakil presiden. Kegagalan meraih kekuasaan melalui partai lama mendorong pembentukan kendaraan politik baru yang lebih selaras dengan visi ideologis dan kepemimpinan personal (Mietzner, 2013; Aspinall, 2014).

Secara ideologis, Gerindra mengusung nasionalisme populis dengan penekanan pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial. Ideologi ini dikonstruksi sebagai kritik terhadap liberalisasi ekonomi dan dominasi oligarki yang dianggap melemahkan peran negara dalam melindungi kepentingan rakyat (Robison & Hadiz, 2014). Narasi tersebut kemudian dilembagakan dalam dokumen resmi partai, seperti manifesto dan AD/ART, yang berfungsi sebagai instrumen institusionalisasi nilai dan tujuan partai (Panebianco, 1988).

Dalam perkembangannya, Gerindra menunjukkan kemampuan institusionalisasi yang relatif cepat dibandingkan partai baru lainnya. Hal ini tercermin dari pembentukan struktur kepengurusan yang menjangkau hingga tingkat daerah, penguatan organisasi sayap, serta konsolidasi kader melalui mekanisme rekrutmen yang terpusat. Model institusionalisasi yang

bersifat sentralistik ini memperkuat kontrol elit pusat terhadap arah politik partai, sekaligus menjaga konsistensi ideologis dan loyalitas kader (Randall & Svåsand, 2002; Mietzner, 2020).

Dari sisi elektoral, performa Gerindra mengalami peningkatan signifikan sejak Pemilu Legislatif 2009 hingga 2019. Partai ini secara konsisten berada di jajaran partai dengan perolehan suara tertinggi, yang menunjukkan keberhasilan strategi mobilisasi pemilih berbasis figur, nasionalisme, dan isu ekonomi-politik. Keberhasilan tersebut mengonfirmasi temuan literatur bahwa partai baru dapat bertahan dan berkembang apabila mampu mengombinasikan kepemimpinan kuat, organisasi efektif, dan narasi politik yang resonan dengan konteks sosial pemilih (Harmel & Svåsand, 1993; Kitschelt, 2000).

Strategi Politik Gerindra dalam Pemilu Presiden 2019

Pemilu Presiden 2019 merupakan arena strategis bagi Gerindra untuk menantang dominasi kekuasaan petahana sekaligus mempertegas posisinya sebagai partai oposisi utama. Strategi politik Gerindra dalam Pilpres 2019 dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu pencalonan figur, pembentukan koalisi elektoral, dan konstruksi narasi kampanye.

Pertama, strategi pencalonan figur menempatkan ketua umum partai sebagai calon presiden untuk ketiga kalinya. Keputusan ini mencerminkan sentralitas kepemimpinan karismatik dalam struktur dan strategi politik Gerindra. Dalam perspektif teori kepemimpinan karismatik, figur pemimpin berfungsi sebagai simbol perjuangan politik sekaligus alat mobilisasi dukungan elektoral melalui daya tarik personal dan legitimasi historis (Weber, 1978; House, 1997). Meskipun strategi ini memiliki risiko kelelahan elektoral, Gerindra menilai bahwa popularitas dan pengenalan publik terhadap figur tersebut masih menjadi aset utama.

Kedua, Gerindra membangun koalisi elektoral dengan sejumlah partai politik yang memiliki kepentingan strategis serupa dalam menghadapi petahana. Pembentukan koalisi ini mencerminkan kalkulasi rasional untuk mengonsolidasikan suara oposisi dalam sistem multipartai. Dalam teori koalisi elektoral, aliansi semacam ini dipahami sebagai upaya memaksimalkan peluang kemenangan melalui agregasi sumber daya politik dan elektoral (Laver & Schofield, 1998; Strøm et al., 2008). Namun, heterogenitas ideologis dalam koalisi juga memunculkan tantangan koordinasi dan konsistensi pesan politik.

Ketiga, strategi narasi kampanye Gerindra berfokus pada isu ekonomi-politik, nasionalisme, dan kritik terhadap kinerja pemerintah. Narasi ini dirancang untuk membangun dikotomi antara elite penguasa dan rakyat, serta menampilkan Gerindra sebagai representasi perubahan dan keberpihakan pada kepentingan nasional. Strategi wacana semacam ini sejalan dengan kecenderungan populisme elektoral yang berkembang di berbagai negara demokrasi, di mana partai oposisi memanfaatkan ketidakpuasan publik sebagai basis mobilisasi politik (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2017; Warburton & Aspinall, 2019).

Secara keseluruhan, strategi Gerindra dalam Pilpres 2019 menunjukkan kombinasi antara kepemimpinan karismatik, pragmatisme koalisi, dan populisme wacana. Meskipun tidak berhasil memenangkan pemilu, strategi tersebut berhasil memperkuat posisi Gerindra sebagai kekuatan oposisi yang signifikan dan berpengaruh dalam dinamika politik nasional.

Pengaruh Partai Gerindra terhadap Dinamika Politik Nasional

Keberadaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam sistem politik Indonesia memberikan pengaruh signifikan terhadap dinamika politik nasional, khususnya dalam konteks kompetisi elektoral, konsolidasi oposisi, dan mekanisme checks and balances dalam demokrasi presidensial. Sebagai salah satu partai dengan perolehan suara besar sejak Pemilu 2009,

Gerindra berkontribusi pada penguatan polarisasi politik yang bersifat kompetitif, terutama dalam dua pemilu presiden terakhir (Aspinall & Mietzner, 2019).

Dalam konteks oposisi politik, Gerindra memainkan peran strategis sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif. Literatur demokrasi menegaskan bahwa oposisi yang kuat merupakan prasyarat penting bagi akuntabilitas pemerintah dan kualitas demokrasi (Dahl, 1971; Diamond, 1999). Peran Gerindra sebagai oposisi pasca-Pilpres 2019 memperlihatkan bagaimana partai politik dapat memanfaatkan ruang parlemen, wacana publik, dan mobilisasi massa untuk mengawasi kebijakan pemerintah, meskipun tidak memegang kekuasaan eksekutif secara langsung.

Pengaruh Gerindra juga terlihat dalam perubahan pola koalisi dan pragmatisme politik nasional. Bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintahan pasca-2019 mencerminkan fleksibilitas koalisi dalam sistem presidensial multipartai Indonesia. Fenomena ini menguatkan argumen bahwa koalisi di Indonesia bersifat cair dan lebih didorong oleh kepentingan stabilitas pemerintahan dibandingkan konsistensi ideologis (Mietzner, 2016; Slater & Simmons, 2018). Dengan demikian, Gerindra berperan dalam memperkuat kecenderungan konsensualisme elite sekaligus memunculkan perdebatan tentang pelemahan oposisi formal.

Dari sisi budaya politik, kontestasi yang melibatkan Gerindra dalam Pilpres 2019 turut berkontribusi pada meningkatnya polarisasi masyarakat berbasis identitas dan preferensi politik. Polarisasi ini, meskipun berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial, juga menunjukkan meningkatnya partisipasi politik warga dan intensitas kompetisi demokratis (Warburton, 2020). Dalam jangka panjang, pengaruh Gerindra terhadap dinamika politik nasional mencerminkan ambivalensi antara penguatan demokrasi elektoral dan tantangan terhadap kohesi sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) merupakan contoh penting dari keberhasilan institusionalisasi partai politik baru dalam sistem demokrasi multipartai Indonesia. Melalui kepemimpinan karismatik, penguatan struktur organisasi, dan konstruksi narasi nasionalisme-populis, Gerindra mampu berkembang pesat dan menjadi aktor sentral dalam kontestasi politik nasional.

Dalam Pemilu Presiden 2019, strategi politik Gerindra yang mengombinasikan sentralitas figur, pembentukan koalisi elektoral, dan mobilisasi isu ekonomi-politik berhasil memperkuat posisinya sebagai kekuatan oposisi utama, meskipun tidak menghasilkan kemenangan elektoral. Strategi tersebut menegaskan relevansi teori kepemimpinan karismatik dan koalisi elektoral dalam menjelaskan dinamika pemilu presiden di Indonesia.

Secara lebih luas, pengaruh politik Gerindra terhadap dinamika nasional bersifat multidimensional. Di satu sisi, partai ini berkontribusi pada penguatan kompetisi politik, oposisi, dan partisipasi demokratis. Di sisi lain, fleksibilitas koalisi pasca-pemilu menunjukkan kecenderungan pragmatisme elite yang dapat melemahkan fungsi oposisi formal. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian partai politik pada negara demokrasi yang sedang bertumbuh sekaligus menawarkan manfaat aplikatif dalam memperkuat institusionalisasi partai dan peningkatan mutu demokrasi di Indonesia.

REFERENSI

- Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. *Theory Into Practice*, 39(3), 124–130.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy: Toward consolidation*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (5th ed.). London: Sage.
- Harmel, R., & Svåsand, L. (1993). Party leadership and party institutionalisation. *West European Politics*, 16(2), 67–88.
- House, R. J. (1997). Charismatic leadership in service-producing organizations. *International Journal of Service Industry Management*, 8(2), 126–138.
- Kitschelt, H. (2000). Linkages between citizens and politicians in democratic polities. *Comparative Political Studies*, 33(6–7), 845–879.
- Laver, M., & Schofield, N. (1998). *Multiparty government: The politics of coalition in Europe*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Mainwaring, S., & Scully, T. (1995). *Building democratic institutions: Party systems in Latin America*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Mietzner, M. (2016). Coercing loyalty: Coalitional presidentialism and party discipline in Indonesia. *Comparative Political Studies*, 49(6), 781–817.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036.
- Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Panebianco, A. (1988). *Political parties: Organization and power*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party institutionalization in new democracies. *Party Politics*, 8(1), 5–29.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2014). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. London: Routledge.
- Slater, D., & Simmons, E. (2018). Coping by colluding: Political uncertainty and authoritarian resilience. *Comparative Political Studies*, 51(7), 982–1016.
- Strøm, K., Müller, W. C., & Bergman, T. (2008). *Cabinet and coalition bargaining*. Oxford: Oxford University Press.
- Tosh, J. (2015). *The pursuit of history* (6th ed.). London: Routledge.

- Warburton, E. (2020). Deepening polarization and democratic decline in Indonesia. *Pacific Review*, 33(6), 899–929.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's democratic regression: Structure, agency and popular opinion. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255–285.